

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada triwulan IV yang berlangsung dari bulan Oktober – Desember 2024, bertepatan dengan jatuhnya HBKN Natal dan Tahun Baru. Dimana terjadi lonjakan permintaan bahan komoditi pokok dan penting. Namun pada triwulan IV ini Kabupaten Natuna bisa mengakomodir dengan baik sehingga tidak terjadi lonjakan harga signifikan, bahkan cenderung stabil dan beberapa komoditas seperti gula, minyak dan cabe merah mengalami penurunan harga.

Berikut daftar harga barang kebutuhan pokok dan penting pada triwulan IV di Kabupaten Natuna:

No	Komoditi	Oktober	November	Desember	Perubahan Harga (%)
1	Beras	15,667	15,667	15,667	-
2	Gula	17,643	17,643	17,357	- 0.02
3	Minyak Goreng	21,800	18,167	18,500	- 0.18
4	Tepung Terigu	14,000	14,000	14,000	-
5	Daging	140,000	140,000	140,000	-
6	Telur Ayam Ras	59,214	60,000	60,000	0.01
7	Cabe Merah	94,167	90,385	87,308	- 0.08
8	Bawang Merah Jawa	38,071	38,857	43,500	0.12
9	Kacang Kedelai	13,571	16,000	16,000	0.15

Dari data stok ketersediaan bahan pangan strategis pada triwulan IV menunjukkan bahwa kebutuhan beras dan gula sudah terpenuhi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan angka ketersediaan beras melebihi angka kebutuhan. Berikut neraca kebutuhan barang pokok dan penting di Kabupaten Natuna:

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan IV tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Natuna menghadapi beberapa permasalahan dalam Pengendalian Inflasi Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim masih berlangsung pada triwulan ke IV ini, hal ini menyebabkan nelayan tidak bisa melaut sehingga. Angin kencang yang menerjang Kabupaten Natuna pada tanggal 17 September 2024 mengakibatkan 12 pohon tumbang hingga mengakibatkan kerusakan rumah warga.

2. Transportasi

Triwulan ke IV berlangsung dari bulan Oktober-Desember dimana bulan Desember adalah libur sekolah. Tentunya ini akan berdampak pada kebutuhan transportasi yang meningkat baik transportasi darat maupun laut. Harga tiket pesawat Natuna-Batam yang berkisar diantara Rp1.325.100,00 - Rp2.687.400,00 menyebabkan masyarakat masih sangat bergantung kepada transportasi laut dengan harga tiket KM Bukit Raya Natuna-Kijang sebesar Rp292.000,00.

No	Kategori	Ketersediaan (ton)			Kebutuhan (ton)			Neraca (ton)		
		Ok	Nov	Des	Ok	Nov	Des	Ok	Nov	Des
1	Beras	67,88	79,61	80,88	210,11	210,11	210,11	142,23	130,50	129,23
2	Gula	335,16	346,34	359,57	68,49	68,49	68,49	266,67	277,85	291,08
3	Pertanian									
3	Minyak Goreng	20,75	20,73	20,70	82,93	82,93	82,93	-62,18	-62,20	-62,23
4	Daging	44,50	0,96	1,82	3,72	3,72	3,72	40,78	1,76	1,50
5	Telur Ayam Ras	55,54	38,90	35,79	64,98	64,98	64,98	-29,44	-26,08	-29,19
6	Cabe Merah	3,55	4,14	4,34	9,97	9,97	9,97	-6,42	-5,83	-5,63
7	Bawang Merah	5,38	5,31	5,53	24,58	24,58	24,58	-19,20	-19,37	-19,05
3.	Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.									

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi pada triwulan IV ini difokuskan kepada kestabilan harga dan ketersediaan barang pokok dan penting. Berikut kegiatan yang dilakukan pada Triwulan IV di Kabupaten Natuna:

Koordinasi rutin antar Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Natuna untuk

1. menjaga harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten Natuna tetap stabil.
 2. Monitoring harga barang kebutuhan pokok dan penting di pasar ranai, distributor dan toko-toko yang rutin dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro.
 3. Melakukan monitoring dan pengawasan perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting di Kecamatan Serasan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 4. Melakukan monitoring dan pengawasan Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Seluan, Bunguran Barat, Pulau Tiga dan Serasan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna melakukan koordinasi dengan Direktur Jendral Perhubungan Laut untuk mengajukan penambahan angkutan kapal pendamping khusus pada *peak season*
 6. GPM yang dilaksanakan bulan Oktober untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan di Kabupaten Natuna selama HBKN Nataru.
 7. Melakukan monitoring dan pengawasan Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Suak Midai dan Kecamatan Pulau Seluan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 8. Pengumpulan informasi dan perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting setiap bulan dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Natuna oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Natuna.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
1. Koordinasi yang dilakukan tim TPID yang melibatkan OPD terkait sudah sangat baik namun belum maksimal dan sudah melibatkan Polri dalam kegiatan GPM yang dilakukan. Namun, Pemerintah Daerah perlu memperkuat sinergi dengan lembaga BUMD, BUMN dan pengusaha untuk bekerja sama dalam menekan inflasi daerah.
 2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Lokal dengan meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan serta meningkatkan penangkapan ikan, dan budidaya ikan. Masyarakat perlu dilakukan pendampingan untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikanan, baik budidaya maupun tangkap.
 3. Perlu dilakukan kerjasama dengan daerah lain untuk menampung hasil pertanian dan nelayan agar masyarakat memiliki daya dorong untuk semakin maju lagi dalam meningkatkan hasil pertanian dan perikanan.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Natuna, maka Pemerintah Kabupaten Natuna merekomendasikan beberapa kebijakan Pengendalian Inflasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat mendukung pelaksanaan operasi pasar murah khususnya komoditas pangan strategis seperti telur ayam ras, cabai, minyak dan sayuran.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat memberikan pendampingan kepada Nelayan dan Petani untuk meningkatkan hasil perikanan dan pertanian, sehingga Natuna bisa menjadi daerah

penghasil.

3. Mendorong diversifikasi penggunaan pupuk untuk efisiensi biaya usaha tani disertai dengan edukasi kepada para petani dan memfasilitasi business matching antara produsen/distributor pupuk dengan kelompok tani.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat agar meninjau kembali tarif angkutan udara di Kabupaten Natuna, dimana tarif angkutan udara masih cenderung tinggi hingga mencapai Rp. 2.687.400 untuk sekali penerbangan dari Natuna menuju Batam.
5. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat dapat merekomendasikan penambahan maskapai atau menambah rute penerbangan dari dan keluar Natuna. Dimana hanya terdapat 2 maskapai yaitu Wings Air dan Nam Air dengan rute penerbangan hanya Batam-Natuna dan Natuna Batam.